

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan H. Zaenal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiman, Arief, 2002, *Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Hermeneutika Hukum*, Cet. I, UII Press, Yogyakarta.
- Hehanussa, Deassy J.A. Et. Al. 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Bhakti Persada, Bandung.
- Isra, Saldi dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Mahendra, Yusril Ihza, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mahmud MZ, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mappiasse, Syarif, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan Pitlo, 1993, *Bab Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Palguna, I.D.G, 2019, *Penemuan Hukum dan Penggunaan Yurisprudensi Oleh Mahkamah Konstitusi*.
- Santoso, Topo dan Ida Budhiati, 2023, *Pemilu di Indonesia: Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Silalahi, Wilma, 2019, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Rajawali Pers, Depok.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Solikin, Nur, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Pasuruan.

Sopacua, Margie Gladies, dkk, 2023, *Hukum Pemilihan Umum Indonesia*, Widina Media Utama, Bandung.

Susanti, Diah Imaningrum, 2015, *Penafsiran Hukum yang Komprehensif Berbasis Lingkar Hermeneutika*, PHILS, Malang.

Visser't Hoft, 2001, *Penemuan Hukum, [Rechtsvinding]*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT.

Putusan Sidang Ajudikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023.

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 16-PKE-DKPP/1/2024.

D. Jurnal

Askarial, 2018, *“Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum”*, Menara Ilmu, Vol. XII, Jilid II, No. 79.

Fahmi, Khairul, 2017, *“Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada: The Shift of the Limitation of Suffrage in General and Local Elections Regulations”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4.

Fahmi, Khairul, Feri Amsari dan Busyra Azheri, 2020, *“Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat (Electoral Justice System in Handling 2019 Concurrent Election Violations and Disputes in West Sumatera)”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 1.

Ghafur, Jamaludin, 2020, *“Politik Hukum Pengaturan Hak Politik Bagi Mantan Narapidana Dalam Pemilu”*, ResearchGate, Prosiding Senas POLHI ke-2 Tahun 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Haryono, Dodi, 2021, *“Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja (the Interpretation Method of the Constitutional Court Decision Regarding Constitutional Review of the Job Creation Law)”*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 4.

Hindiawati, Wahyu, 2024, *“Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada Pencalonan Pemilu Tahun 2024”*, Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang.

Maghfiroh, Kholifatu, Lita Tyesta A.L.W, dan Retno Saraswati, 2018, *“Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pencalonan Mantan Narapidana Sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, serta Sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”*, Diponegoro Law Journal, Vol. 7, No. 2.

Mezak, Meruy Hendrik, 2006, *“Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5, No. 3, Maret 2006.

- Mulyani, 2024, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Teori Utilitarianisme John Stuart Mill*”, Universitas Islam Negeri Salatiga.
- Mulyani, Basri, 2024, “*Penafsiran Hukum Pasal 87 Ayat (1) Huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tindak Pidana Lainnya Terhadap Hak Konstitusional Warga Negara Menjadi Calon Anggota Legislatif*”, *Juridicia*, Vol. 5, No. 2, Mei 2024.
- Munawir, Yusron, 2023, “*Disharmonisasi Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024*”, *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan*, Vol. 3, No. 2.
- Nurchahyo, Ari dan Lutfia Harizuandini, 2024, “*Urgensi Pengawasan Pencalonan Mantan Narapidana Anggota DPD*”, *Jurnal Pengawasan Pemilu, BAWASLU DKI Jakarta*.
- Sida, Noer, 2018, “*Hak Mantan Narapidana Untuk Turut Serta Dalam Pemerintahan, Justitia Et Pax*”, Vol.34, No. 2.
- Siregar, Fritz Edward, 2015, “*Indonesia Constitutional Court Interpretation Constitutional Methodology*”, *Constitutional Review*, Vol. 1, No. 1.
- Supena, Cecep Cahya, 2022, “*Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum*”, *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 8, No. 2.
- Tanjung, Muhammad Anwar dan Retno Saraswati, 2018, “*Demokrasi dan Legalitas Mantan Narapidana Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty Of Law, Universitas Islam Indonesia*, Vol. 25, No. 2, Mei 2018.
- Yolanda, Dita Nora, Retno Saraswati dan Ratna Herawati, 2018, “*Implikasi Putusan MK RI No. 14-17/PUU-V/2007 dan Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 Terhadap Hak Pilih Mantan Terpidana*”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 7, No. 4.

E. Internet

- Argawati, Utami, “Memperketat Syarat Mantan Napi Calon Senator”, <https://www.Mkri.id/index.php>.
- Bawaslu RI, “Bawaslu Menolak Permohonan Irman Gusman untuk Seluruhnya”, <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-menolak-permohonan-irman-gusman-untuk-seluruhnya>.
- Fajarihza, Reyhan Fernanda, “Ahli Beberkan Alasan KPU Coret Irman Gusman Dari DCT DPD Sumbar”, <https://kabar24.bisnis.com/read/20240603/15/1770730/ahli-beberkan-alasan-kpu-co-ret-irman-gusman-dari-dct-dpd-sumbar>.

Hukum Online, “Irman Gusman Divonis 4,5 Tahun dan Pencabutan Hak Politik”, <http://www.hukumonline.com/berita/a/irman-gusman-divonis-4-5-tahun-dan-pencabutan-hak-politik>,

Indonesia Corruption Watch (icw), “Menyoal Penyelundupan Pasal Oleh KPU tentang Syarat Pencalonan Mantan Napi Korupsi Sebagai Anggota DPR, dan DPD RI”, <https://antikorupsi.org/id/menyoal-penyelundupan-pasal-oleh-kpu-tentang-syarat-pencalonan-mantan-napi-korupsi-sebagai-anggota>.

_____, “Mahkamah Agung Membatalkan Percepatan Pencalegan Mantan Terpidana Korupsi: Bukti Konkret Kebobrokan KPU dalam Menyusun PKPU”, <https://antikorupsi.org/id/mahkamah-agung-membatalkan-percepatan-pencalegan-mantan-terpidana-korupsi-bukti-konkret-kebobrokan>.

Inilah.com, “MK Putuskan PSU Pileg DPD Sumbar, Irman Gusman Wajib Umumkan Dirinya Eks Koruptor”, <https://www.inilah.com/pileg-dpd-sumbar-diulangkannya-wajibkan-irman-gusman-umumkan-dirinya-eks-terpidana-korupsi>.

Jendela Hukum, “Mengenal Macam-Macam Penafsiran Konstitusi”, <https://jendelahunik.com/mengenal-macam-macam-penafsiran-konstitusi>.

Kenny Wiston Law Office, “Mengenal Ratio Decidendi dan Obiter Dicta”, <https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta>.

Komisi Pemberantasan Korupsi, “Statistik TPK Berdasarkan Profesi/Jabatan”, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan>.

Kompas.com, “Laporan ICW, Rata-rata Hukuman Penjara Koruptor Hanya 3 Tahun 4 Bulan”, <https://nasional.kompas.com>.

_____, “KPU Bantah ICW Soal Pasal Selundupan yang Permudah Eks Koruptor Nyaleg”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/05/23/22225941/kpu-bantah-icw-soal-pasal-selundupan-yang-permudah-eks-koruptor-nyaleg>.

_____, “Perjalanan Irman Gusman dari Vonis 4,5 Tahun Hingga Dapat Pengurangan Hukuman”, <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/27/06402091/perjalanan-irman-gusman-dari-vonis-45-tahun-hingga-dapat-pengurangan-hukuman>.

Kompasiana, “Polemik Terhadap Peraturan Bagi Mantan Narapidana Korupsi yang Ikut Nyaleg Dalam Kontestasi Pemilu 2024”, <https://www.kompasiana.com/dandydhytia/659bff5ac5afb04663a4de3/polemik-terhadap-peraturan-bagi-mantan-narapidana-korupsi-yang-ikut-nyaleg-dalam-kontestasi-pemilu-2024>.

Mantalean, Victoria dan Sabrina Asril, “KPU dan Masyarakat Sipil Beda Tafsir Syarat Nyaleg Eks Mantan Terpidana Celah Bagi Koruptor?”, <https://nasionalkompas.com/read/2023/06/01/13493861/kpu>.

Paat, Yustinus Patris, “52 Bakal Caleg DPR dan 16 dari DPD Mantan Terpidana, Ini Daftarnya”, <https://www.beritasatu.com/bersatu-kawal-pemilu/1064287/52-bakal-caleg-dpr-dan-16-dari-dpd-mantan-terpidana-ini-daftarnya>,

Padangmedia.com, “Irman Gusman Serahkan Bukti Pengumuman Sebagai Eks Narapidana Korupsi ke KPU”, <https://padangmedia.com/irman-gusman-serahkan-bukti-pengumuman-sebagai-eks-narapidana-korupsi-ke-kpu>.

Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Irman Gusman Divonis 4,5 Tahun Penjara”, <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read>.

Saputra, Ari, “PTUN DKI Kabulkan Gugatan Irman Gusman, Perintahkan KPU Revisi Daftar Caleg”, <https://news.detik.com/pemilu/d-7098884/ptun>.

Saubani, Andri, “MK Kabulkan Gugatan PHPU Yang Diajukan Calon Anggota DPD Irman Gusman”, Republika, <https://news.republika.co.id/berita/sev8ib409>.

Subarkah, Tri, “KPU Tidak Akan Eksekusi Gugatan Irman Gusman di PTUN”, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/638989/kpu-tidak-akan-eksekusi-gugatan-irman-gusman-di-ptun>.

Sumatera zone, “Irman Gusman Dinilai Tak Jujur Soal Pengumuman di Koran, Jubir Sesalkan Framing Media”, <https://www.sumatrazone.co.id/2024/06/irman-gusman-dinilai-tak-jujur-soal>.

Times Indonesia, “4 Fakta Putusan MK Atas Perkara Irman Gusman Bisa Jadi Pijakan Abah Anton di Pilwali Malang”, <https://timesindonesia.co.id/politik/498840/4-fakta-putusan-mk-atas-perkara-irman-gusman-bisa-jadi-pijakan-abah-anton-di-pilwali-malang->.

Tvonenews.com, “Soal Putusan Irman Gusman Mahkamah Konstitusi Dinilai Tidak Konsisten dalam Memberikan Pertimbangan dan Putusan PHPU”, <https://www.tvonenews.com/berita/nasional/223401-soal-putusan-irman-gusman-mahkamah-konstitusi-dinilai-tidak-konsisten-dalam-memberikan-pertimbangan-dan-putusan>.

123dok, “Pertimbangan Aspek Yuridis, Filosofis, dan Sosiologis dalam Putusan Hakim”, <https://123dok.com/article/pertimbangan-aspek-yuridis-filosofis-sosiologis-putusan-hakim>.